

**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT PEMIKIRAN AL-FARABI
DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN
NEGARA-BANGSA INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RISKI LIA SAPITRI
NPM: 1421020214**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT PEMIKIRAN AL-FARABI
DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN
NEGARA-BANGSA INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**RISKI LIA SAPITRI
NPM : 1421020214**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Ahmad Ngisomudin, S. Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Al-Farabi sebagai ahli filsafat Islam mengemukakan teori *al-Madinah al-Fadilah* untuk mengharmonikan antara agama dan filsafat. Konsep kenegaraan yang terdapat dalam teori al-Farabi ini banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung di muka bumi ini. Sikap kepemimpinan Rasulullah menjadi titik tolak kecenderungan al-Farabi dalam melahirkan pemikiran mengenai konsep kenegaraan. Pemikiran al-Farabi ini penting dalam menyelesaikan kemelut masyarakat bagi mencari suatu bentuk negara yang ideal.

Fokus masalah penelitian ini adalah, bagaimanakah konsep negara ideal menurut pemikiran al-Farabi, dan bagaimanakah relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pemikiran al-Farabi tentang negara ideal dan untuk menganalisis secara mendalam terhadap pemikiran al-Farabi, mengenai konsep negara ideal sekaligus relevansinya dengan negara-bangsa Indonesia. Sedangkan kegunaannya secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum yang selalu dinamis, dan secara praktis sumbangan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan negara-bangsa Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat *deskriptif-analitis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*, konsep negara ideal menurut al-Farabi adalah masyarakat yang sempurna yang mana jumlah keseluruhan bahagian-bahagiannya sudah lengkap, yang anggotanya terdiri dari warga yang berbeda kemampuan dan fungsinya, hidup saling membantu atau dengan kata lain senasib dan sepenanggungan. Masing-masing mereka harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasi mereka. *Kedua*, Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan al-Farabi ini adalah fungsi kepala Negara. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, berani, kuat, cerdas, pecinta pengetahuan serta keadilan. *Ketiga*, Konsep negara ideal menurut al-Farabi masih relevan dengan pembangunan negara bangsa di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam butir-butir dasar negara yakni Pancasila yang menyerap nilai-nilai ketuhanan. Jika semua tujuan yang tertuang dalam Pancasila dapat terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan negara akan dapat terwujud. Hal ini selaras dengan konsep negara ideal menurut al-Farabi dimana suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, materil dan spiritual.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

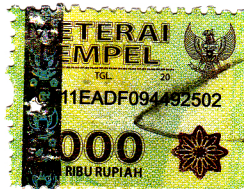
Nama : Riski Lia Syafitri
NPM : 1421020214
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farabi dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2019

Penulis,



Riski Lia Syafitri
1421020214



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : Riski Lia Syafitri
NPM : 1421020214
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farabi dan Relevansinya dalam Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia.

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 197501292000031001

Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197512302003121002

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farabi dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia"**, disusun oleh Nama: Riski Lia Syafitri, NPM: 1421020214, Program Studi : Siyashah Syar'iyah (Hukum Tata Negara), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis, 12 Desember 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Ahmad Ngikomuddin. S.Ag., M.Ag. (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Ngikomuddin Tahmid, M.H.
NPM.14221993031002

MOTTO

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".(Q.S.al-Baqarah: 124)¹

¹ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009). h. 289.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya sebagai bukti hormat dan kasih sayang, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya:

1. Abah Ehan Ahmad Rudi dan Ibu Rohana serta Bapak Tukiman dan Ibu Kholiah yang senantiasa penulis cintai dan banggakan selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberi motivasi baik moril maupun materiil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak kedepannya sehingga penulis mampu untuk meraih yang penulis harapkan dan cita-citakan yakni menjadi orang yang berilmu.
2. Kakak saya Windi Hendriono dan adik saya Friska Salsa Billa yang selalu mendukung dan menyemangati saya untuk menggapai cita-cita.
3. Terkhusus almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Riski Lia Sapitri. Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus pada tanggal 08 Februari 1997, anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara Vindi Hendriono dan Friska Salsa Billa. Putri dari pasangan Bapak Tukiman dan Ibu Kholiah.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Tanjung Rejo, Pulau Panggung dan lulus pada tahun 2007.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Al-Ma'ruf Margodadi, Sumberejo dan lulus pada tahun 2010.
3. Madrasah Aliyah (MA) di MA Al-Ma'ruf Margodadi, Sumberejo dan lulus pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini , dengan judul “Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara Bangsa Indonesia”. Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H, beserta staff dan jajarannya,
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Dr. Nurnazli, S.H, S.Ag., M.H, serta Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Frankie, M.Si.
4. Pembimbing I Dr. Maimun, S.H., M.A, dan Pembimbing II Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag, yang telah banyak meluangkan waktu serta

memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi manfaat.

Akhir kata jika ditemui ada kesalahan dan kelalaian didalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 28 November 2019

Riski Lia Sapitri
NPM. 1421020214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar Tentang Negara	14
B. Teori Pembentukan Negara	21
C. Bentuk-bentuk Negara	29
D. Konsep Negara Bangsa	34
E. Tinjauan Pustaka	41
BAB III PEMIKIRAN AL-FARABI TENTANG KONSEP NEGARA IDEAL	
A. Biografi Al-Farabi	44
B. Asal Usul Negara atau Kota Menurut Al-Farabi	50
C. Pemikiran Al-Farabi tentang Negara Ideal	56
D. Relevansi Pemikiran Al-Farabi tentang Negara Ideal dalam Pembangunan Negara-negara	66
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi	74
B. Relevansi Pemikiran Al-Farabi dengan Negara Bangsa di Indonesia	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT PEMIKIRAN AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN NEGARA-BANGSA INDONESIA”** yaitu sebagai berikut:

1. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan.¹
2. Negara Ideal adalah negara yang mampu menegakkan hukum dalam negaranya dan mampu memberdayakan dan mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.²
3. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam pertama di bidang filsafat logika yang berupaya menghadapkan dan mempertalikan antara filsafat politik Yunani klasik dengan Islam.³
4. Negara-bangsa (*Nation State*) adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Pengertian bangsa atau *nation* itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah ummah (*ummat-un, umat*),

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 560.

² Nurcholish Madjid, *Tentang “Negara-Bangsa” (“Nation-State”)* (Bandung: Bulan Bintang, 2002), h. 1

³ Abd. Sidiq, *Islam dan Filsafat* (Jakarta: Triputra, 1984), h. 89.

seperti *United Nations*, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang terjemah Arabnya ialah *al-Umam al-Muttahidah*, Umat-umat Bersatu. Jadi, Negara-bangsa adalah Negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan Negara-bangsa ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan salaf disebut *al-mashlahah al-'ammah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, padanan pengertian *general welfare*), suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali.⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa istilah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu gagasan atau konsep dari Al-Farabi tentang sebuah negara yang ideal dan relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Pemikiran politik al-Farabi, baik dalam konteks sejarah politik Islam maupun dalam penerapan konsep bernegara dalam Islam ternyata sangat berpengaruh dalam membangun negara ideal di era moderen ini. Oleh sebab itu al-Farabi masih menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Islam karena pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian.

⁴ *Ibid.* h. 2.

2. Alasan Subjektif

- a. Konsep negara ideal al-Farabi ini selalu menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan mahasiswa ketika mengkaji model negara yang ideal.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, selain itu penulis penulisan ini didukung dengan berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu niscaya akan dimintai pertanggungjawabannya. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kewajiban manusia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan sesuatu yang dilakukannya.

Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad Saw dan oleh empat Khulafa al Rasyidin.⁵

Salah satu karekteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya, adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam

⁵ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 10

dipenuhi oleh kisah-kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad (periode Madinah) sampai masa-masa jauh setelah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslimin, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi. Seperti di masa Umar bin Khattab, kenyataan historis tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak setelah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme, Persia, muncul ungkapan bahwa “Islam adalah agama dan negara” (*al-islam din wa Dawlah*), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan politik.⁶

Sebagian besar masyarakat kerap kali membahas nemtuk negara karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Dapat dikatakan bahwa adanya negara merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia tertentu bersifat umum, yaitu mencakup semua kebutuhan termasuk kebutuhan untuk tenang beribadah kepada Tuhan.⁷ Al-Farabi membahasnya dengan kebahagiaan jasmani maupun rohani (*sa’adah maddiyah wa mannawiyah*).

Sa’adah maddiyah wa mannawiyah ini tentu tidak akan di peroleh manusia kecuali manusia, mereka hidup dalam sebuah komunitas di Negara Ideal (*Madinah al-Fadhilah*). Untuk sampai kepada cita-cita tersebut, diperlukan orang yang benar mampu hakikat kemanusiaan secara sempurna, yaitu yang dapat berhubungan dengan wujud pertama (Tuhan) melalui akal aktif (*al-aql al*

⁶ *Ibid.* h. 11.

⁷ Mabaül Ngadimah, *Potret Keberagaman Islam Indonesia: Studi Pemetan Pemikiran Dan Gerakan Islam*, dalam jurnal *Innovatio*,h. 81.

fa'al) menjadi pemimpin utama. Seorang pemimpin utama adalah ialah seorang manusia yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna (sempurna sebagai manusia) dapat membawa masyarakat menuju cita-cita luhur.⁸

Teori politik al-Farabi (w. tahun 339H/950M) tentang negara utama bermuara pada pengakuan tentang adanya Tuhan dan pengabdian terhadapnya (teosentris). Hal ini sangat berbeda dengan teori politik dan kenegaraan Yunani. polis, sebagaimana dinyatakan oleh Paul Cartledge, bukanlah teokrasi. Pemujaan terhadap para dewa bagi bangsa Yunani sepenuhnya berdasarkan pada pemikiran, konvensi, kebiasaan yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua pemujaan tergantung pada manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih sewa, tempat, dan cara untuk memuja sesuai keagamaan pilihan yang ditawarkan dibawah sistem politik yang hampir tidak terbatas.”

Bangsa Yunani melakukan pemujaan tanpa bantuan kelompok agamawan, dogma, dan kitab suci. Dalam pengertian utamanya yang lain, yang menguatkan karakter keyakinan keagamaan dan praktik Yunani yaitu *nomos*, yang berarti hukum, seperti yang diperlihatkan oleh hukum positif bangsa Athena terhadap Socrates yang dijatuhi hukuman lantaran menyatakan bahwa tidak pantas ia mengakui Dewa yang di sembah di kota itu. Dengan berlandaskan konsep ketuhanan itu, al-Farabi kemudian menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah memperoleh kebahagiaan dan keadilan.⁹

⁸ Moh. Asyari Muthhar, *Ideal State Prespektif Al farabi Tentang Konsep Negara Ideal* (Yogyakarta: IciSoD, Desember 2018), h. 143

⁹ *Ibid.* h. 144

Seiring dengan hal tersebut, konsep negara ideal tidak akan ada habisnya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dialami manusia itu sendiri yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan jaman. Karena manusia sebagai makhluk sosial (*social being*), sebagai wujud pada kenyataan bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang mampu lahir dan berkembang tanpa bantuan dari orang lain, karena hidup berdampingan dengan orang lain itu sendiri merupakan fitrah dari kehidupan manusia. Sebagaimana individu-individu manusia adalah bersifat organik, yang dilahirkan kemudian melewati tiga fase pertumbuhan, diantaranya pertumbuhan awal, pertumbuhan dewasa, pertumbuhan tua yang akhirnya mereka akan merasakan kematian¹⁰.

Oleh karena itu manusia dari individu-individu yang berbeda baik jenis kelamin, suku, bangsa, ras, dan agama, yang kemudian berkembang biak yang pada akhirnya membentuk komunitas berdasarkan kebangsaan dan ideologi kelompoknya. Negara atau pemerintahan sebagai sebuah institusi yang akan menata dan memelihara ketentraman masyarakat, diharapkan mampu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang semaksimal mungkin dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, negara mempunyai tingkat kesulitan dalam prosesnya. Dengan kata lain membentuk suatu negara merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi merupakan cara yang paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuan. Konsep negara secara universal adalah sistem penyelenggaraan

¹⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), h.

pemerintahan dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia.

Bentuk negara sebagai wadah, institusi politik masyarakat Islam yang diharapkan mampu menerapkan dan melaksanakan hukum Islam sebagai usaha membina masyarakat Islam dalam kehidupan dunia dan akhiratnya yang tidak kunjung sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat khususnya di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas ummat Islam.¹¹ Hal ini, jelas nampak dengan keadaan negara-negara yang secara umum melabeli ideologi negaranya dengansyariat Islam ataupun pengaplikasiannya masih diselimuti tindakan-tindakan diluar dari nilai-nilai keislaman itu sendiri.¹²

Oleh sebab yang demikian, al-Farabi yang merupakan ahli filsafat Islam mengemukakan teori *al-Madinah al-Fadilah* untuk mengharmonikan antara agama dan filsafat. Konsep kenegaraan yang terdapat dalam teori al-Farabi ini banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasullullah Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung dimuka bumi ini. Sikap kepemimpinan Rasullullah menjadi titik tolak kecenderungan al-Farabi dalam melahirkan pemikiran mengenai konsep kenegaraan. Pemikiran al-Farabi ini penting dalam menyelesaikan kemelut masyarakat bagi mencari suatu bentuk negara yang ideal.¹³

¹¹ Maskuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet I. 1999), h. 71

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Legalitas Politik: Dinamika Perspektif Nash dan As-Syar'iyah* Terjemahan Amirullah Kandu dan Maman Abd. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2008)h. 61

¹³ Idris Zakaria, *Teori Kenegaraan Al-Farabi* (Bangi: University Kebangsaan Malaysia 1986) h. 121

Para pendiri negara kita sejak dari semula menggagas terbentuknya sebuah negara-bangsa. Meskipun dalam pandangan politik Eropa gagasan negara-bangsa itu merupakan hal baru sehingga secara lengkap sering disebut negara-bangsa baru atau modern *nation state*, namun cikal bakal gagasannya, bahkan pelaksanaan penuhnya, telah ada dan pernah terjadi secara nyata dalam zaman-zaman sebelum zaman modern sekarang ini.

Seluruh warga bangsa Indonesia lebih-lebih kaum Muslim yang merupakan golongan terbesar, harus benar-benar memahami pengertian negara-bangsa itu secara benar. Negara-bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa.

Pengertian bangsa atau *nation* itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah *ummah* (*ummat-un, umat*), seperti *United Nations*, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang terjemah Arabnya ialah *al-Umam al-Muttahidah, Umat-umat Bersatu*. Jadi negara-bangsa adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.

Tujuan negara-bangsa (Nation State) ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan salaf disebut *al-mashlahah al-'ammah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, padanan pengertian *general welfare*), suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dari sudut pandang itu, negara-bangsa berbeda dengan negara kerajaan yang terbentuk tidak berdasarkan kontrak sosial dan transaksi terbuka, tetapi karena

kepeloporan seorang tokoh kuat yang dominan. Karena itu negara kerajaan berdiri demi kejayaan seorang raja dan dinastinya. Sedangkan negara-bangsa, berdasarkan kontrak sosial dalam pembentukannya, bukanlah negara dinastik. Dalam negara-bangsa, semua kebijakan pemerintah harus dibuat dengan sepenuhnya tunduk kepada maslahat umum.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara detail yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi Dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”.

D. Fokus Penelitian

Kajian mengenai konsep negara ideal ini luas sekali dan hampir semua ahli Hukum Tata Negara membahasnya dari era klasik hingga era kontemporer ini, maka penulis pembahasannya dibatasi :

1. Konsep Negara Ideal menurut pemikiran Al-Farabi.
2. Relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep negara ideal menurut Pemikiran Al-Farabi?
2. Bagaimanakah relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Tentang “Negara-Bangsa” (“Nation-State”)*, h. 2

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan dan menjelaskan pemikiran Al-Farabi tentang negara ideal.
2. Menganalisis secara mendalam terhadap pemikiran al-Farabi, mengenai konsep negara ideal sekaligus relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia.

G. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini :

1. Menambah perspektif baru atau khazanah intelektual tentang teori kenegaraan dari filsuf muslim, di antaranya al Farabi.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai wacana dan referensi, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi warga negara Indonesia untuk memperbaiki kondisi negara Indonesia yang sedang terus membangun dalam berbagai seginya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari sebagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan

permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁶

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang berkaitan yang berkaitan dengan pembahasan untuk dikaji secara mendalam. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, sedangkan data yang di perlukan adalah data skunder dengan menelusuri sumber-sumber bacaan untuk mendapatkan bahan data primer dan bahan data sekunder.

3. Data Primer

Data primer yaitu karya-karya atau naskah-naskah yang ditulis langsung oleh penulisnya. Data primer berupa buku yang ditulis al- Farabi yang berjudul *Ara Ahl al-Madinah al-Fadlilah* (dasar-dasar ideologi warga negara utama). Buku-buku tersebut merupakan curahan ide untuk mewujudkan negara ideal dari al-Farabi (w. 339 H/950 M).

4. Data Sekunder

¹⁵ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h, 38

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

Data sekunder pembuatan skripsi ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan konsep Negara ideal. Buku tersebut sebagai penunjang pemikiran al-Farabi dan mengenai negara ideal.

5. Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari Al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁷

6. Analisis Data

Setelah data disistematiskan dan dipilah-pilah sesuai pembentukannya, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik *content analysis*. Adapun metode berfikir yang digunakan adalah deduktif. Metode yang digunakan adalah Metode deduktif yaitu cara berfikir deduktif adalah metode analisis

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Tentang Negara

1. Pengertian Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu, *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminology negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai yang konstitutif yang pada lazimnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, negara identic dengan hak dan kewajiban.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²

Pengertian negara menurut R. Kranen Burg adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan kelompok manusia yang disebut bangsa. Adapun menurut

¹ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 135.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2007), h. 777

Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Negara bisa berdiri jika memenuhi unsur-unsur pokok yaitu, umat, teritorial (luas tanah), dan pemerintah.³

Konsepsi Kelsen mengenai Negara yang dikutip J. G Starke, menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.⁴

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.⁵ Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.⁶

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta

³ H. Moh. Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara* (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer) (Malang: Uin Malang Press, 2009), h. 36-38.

⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 128.

⁵ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Moh. Radjah, Bhuratata, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h. 97

⁶ Samidjo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pustaka, 2003), h. 27

bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁷

2. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum:⁸

a. Fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan

Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan.

b. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan

Fungsi negara berikutnya adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang.

c. Fungsi pertahanan

Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

⁷ Jawahir Thontowi Dan Pranoto Iskandar *Ilmu Negara* (Bandung: Bulan Bintang 2004), h. 2.

⁸ Mahfud M. D, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 49.

Fungsi pertahanan penting untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini.

d. Fungsi menegakkan keadilan

Fungsi negara yang berikutnya adalah untuk menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁹

Sedangkan tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama di antaranya yaitu sebagai berikut.

- a. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
- b. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
- c. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
- d. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.

⁹ *Ibid.* h. 50.

e. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia.

Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.¹⁰

Selain tujuan negara secara umum di atas, juga terdapat beberapa teori tujuan negara menurut para ahli. Berikut adalah beberapa teori tujuan negara menurut para ahli yang banyak dijadikan referensi yaitu:¹¹

- a. Teori perdamaian dunia yang dikemukakan Dante Alleghieri. Tujuan negara menurut teori ini adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium.
- b. Teori negara kesejahteraan yang dikemukakan Kranenburg. Tujuan negara menurut teori ini adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.
- c. Teori kedaulatan hukum yang dikemukakan Krabbe. Tujuan negara menurut teori ini adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum dimana hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara.
- d. Teori kekuasaan negara yang dikemukakan Lord Shang Yang. Tujuan negara menurut teori ini adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya.
- e. Teori jaminan atas hak dan kebebasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tujuan negara menurut teori ini adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara.

¹⁰ Inu Kencana Syai'ie, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 136.

¹¹ Mahfud M. D, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2001), h. 267.

- f. Teori kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikemukakan Nicolo Machiavelli. Tujuan negara menurut teori adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat.
- g. Teori perkembangan rakyat yang dikemukakan oleh Roger F. Saltu. Tujuan negara menurut teori ini adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin

3. Unsur-unsur Negara

Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam suatu negara, berikut akan dijelaskan masing-masing unsur tersebut :

- a. Terdapat rakyat atau masyarakat

Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya Negara. Oleh karena itu, tepatlah bila para sosiolog mengatakan bahwa Negara adalah kelompok persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan sepejuangan. Jadi, jika membicarakan Negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu membentuk kelompok masyarakat. Tersebutnya kelompok masyarakat disebabkan karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat Aristoteles. Dapat

dikatakan bahwa hidup bermasyarakat adalah merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta berkeinginan untuk bersatu.¹²

b. Wilayah

Wilayah adalah unsure negara yang harus terpenuhi karna tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas territorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan dan udara. Dalam konsep medrn masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.¹³

c. Pemerintah

Alat kelengkapan Negara yang bertugas organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara. Melalui alat dan aparat Negara, yang menetapkan hokum, melaksanakan ketertiban, keamanan dan mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.

d. Pengakuan Negara lain

Pengakuan negara lain bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua jenis pengakuan suatu negara, yakni pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini diasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Adapun pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis

¹² A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 121.

¹³ *Ibid*, h. 122.

menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu negara mendapat hak-haknya disamping kewajiban sebagai anggota keluarga dunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.¹⁴

Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu Negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan Negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya Negara. Jadi, hanya deklaratif, bukan konstitutif. Tanpa pengakuan dari Negara lain suatu Negara tetap dapat berdiri, misalnya USA memproklamasikan kemerdekaannya pada 1776, sedangkan pengakuan dari Inggris baru diberikan pada 1873. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, padahal waktu itu belum ada satupun Negara mengakui, sedangkan pengakuan dari Belanda pun baru diumumkan pada 1949. Tetapi tidak ada yang membantah sejak 17 Agustus 1945 telah ada Negara Indonesia dan pemerintahannya mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan Negara lain.¹⁵

B. Teori Pembentukan Negara

Banyak teori tentang terbentuknya sebuah negara. Di antaranya teori-teori tersebut akan dipaparkan berikut ini.

1. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)

¹⁴ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 137

¹⁵ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, h. 32.

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara. Penganut mazhab pemikiran ini, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.¹⁶

Kemudian menurut Munawir Sjadzali, setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial. *Pertama*, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis. *Kedua*, Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. *Ketiga*, John Locke juga ilmuwan Inggris. *Keempat*, Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Perancis. Languet dengan nama samara Stephen Junius Brutus, dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; *pertama*, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; *kedua*, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.¹⁷

Thomas Hobbes menyatakan bahwa kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (status naturalis, *state of nature*), dan keadaan setelah ada negara. Bagi

¹⁶ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 137-138.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press. 1993), h. 67.

Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah lalu menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.¹⁸

Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini menurut Sjadzali, suatu gagasan yang kedengarannya aneh.¹⁹

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut berpotensi memunculkan kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Di

¹⁸ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 138.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 68.

sini unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga negara. Bersandar pada alasan inilah negara mutlak didirikan. Namun demikian menurut Locke, penyelenggara negara atau pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara negara dan warga negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warga negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke, terapat hak-hak yang merupakan hak-hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.²⁰

Dengan demikian pemikiran Locke dapat disimpulkan bahwa kontrak dilakukan antara raja untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu *trust* (amanah) dengan rakyat sebagai *trustor* dan sekaligus *beneficiary* (pemberi amanah). Amanah itu dapat dicabut oleh *trustor* jika ternyata *trustee* mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul *Two Treaties of Government*.²¹

Berbeda dengan Hobbes dan Locke, menurut Rousseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutny, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiknya yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai

²⁰ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 138.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 69.

pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara, yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandate bersama tersebut. Melalui pandangan ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandate bersama.²²

Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; *pertama*, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, *kedua*, melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.²³

Meskipun teori-teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pemikir Barat tersebut sangat berkaitan dengan antara pemerintah (negara) dengan rakyat tetapi yang menarik, bahwa dalam pandangan Rousseau mengemukakan juga kewajiban sesama rakyat. Menurut Suseno, Rousseau bertolak dari kehendak-kehendak indivual masing-masing (*volonte particuliere*). Nampaknya individu hanya mengejar kepentingan sendiri masing-masing tanpa perhatian kepada kepentingan umum. Akan tetapi

²² A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 138-139.

²³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* h. 69

menurutnya, kesan itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehendak individu sebenarnya ada dua komponen; *pertama*, suatu kepentingan yang semata-mata memang individual, *kedua*, sebagian dari kepentingan umum. Jadi pada umumnya tidak ada orang yang hanya bersikap egoisme murni. Setiap orang juga menghendaki hal-hal yang merupakan kepentingan bersama (misalnya perdamaian, keadilan, dan keamanan). Dengan demikian dalam kehendak-kehendak individual seseorang terdapat juga unsur-unsur umum yang perlu diperhatikan.²⁴

2. Teori Ketuhanan (*Teokrasi*)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di Timur maupun di belahan Barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa di abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandate dari Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang bertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan *monarchomach* (penentang raja). Menurut mereka, Raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan

²⁴ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : Gramedia. 2003), h. 240.

dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.²⁵

Sedangkan pendapat lain menyatakan, bahwa dalam konsep teori ciptaan Tuhan dijelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena diciptakan oleh Tuhan. Penguasa atau pemerintah suatu negara ditunjuk atau ditentukan oleh Tuhan, sehingga walau pun penguasa atau pemerintah mempunyai kewenangan, sumber kewenangan tetap adalah Tuhan. Oleh karena sumber kewenangan adalah Tuhan, penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah.²⁶

Dalam sejarah tata negara Islam, pandangan teokratis pernah dijalankan oleh raja-raja Muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan atau bayang-bayang Allah di dunia (*khalifatullah fi al-Ard, dzillullah fi al-Ard*), raja-raja Muslim tersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan para raja-raja di Eropa abad pertengahan, raja-raja Muslim merasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi Islam ini pada akhirnya melahirkan doktrin politik Islam sebagai agama sekaligus kekuasaan (*dien wa dawlah*). Paham ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*church*) dan negara (*state*). Sama halnya dengan pengalaman kekuasaan teokrasi di Barat, penguasa teokrasi Islam

²⁵ A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi*, h. 139.

²⁶ Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama" *Al-Adyan*, Vol. VIII, NO. 2, (Juli-Desember, 2013) h. 24.

menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Dipengaruhi pemikiran sekuler Barat, menurut pandangan modernis Muslim, kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan kepada Allah maupun Rakyat.²⁷

3. Teori Kekuatan

Adapun dalam teori kekuatan; bahwa terbentuknya negara adalah karena hasil penaklukan dan kekerasan antarmanusia. Yang kuat dan mampu menguasai yang lain membentuk negara dan memaksakan haknya untuk menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan dalam teori ini adalah kekuatan itu sendiri, karena kekuatan itu yang membenarkan kekuasaan dan kewenangan.²⁸

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d'être*) dari terbentuknya suatu negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk suatu negara. Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, di mana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan

²⁷ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, h. 125.

²⁸ Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama" *Al-AdYaN*, Vol. VIII, N0.2, (Juli-Desember, 2013) h. 24.

bangsa Barat atas bangsa-bangsa Timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, dijumpai banyak negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa colonial. Negara Malaysia dan Brunai Darussalam bisa dikategorikan dalam jenis ini.²⁹

C. Bentuk-bentuk negara

Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belumlah sebesar sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini ada istilahnya yaitu “polis”. Selain itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belumlah ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan.³⁰

Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah: *Monarchi*, *Oligarchi*, dan *Demokrasi*. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang akan bentuk negaranya *Monarchi* (bahasa Yunani “*monos*” berarti “satu” sedangkan “*archien*” berarti “memerintah”). Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu *Oligarchi* (bahasa Yunani “*oligai*” berarti

²⁹ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h. 125-126.

³⁰ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), h. 18.

“beberapa”). Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negara nya disebut *Demokrasi* (bahasa Yunani “*Demos*” berarti “rakyat”).³¹

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: negara kesatuan (*unitarianisme*) dan negara serikat (*federasi*).³²

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi* yaitu sebagai berikut.³³

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia

³¹ *Ibid.* h. 19

³² Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara* (Surabaya: Srikandi, 2005), h.

33

³³ *Ibid.* h. 33-34

dan pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.

2. Negara Serikat

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.³⁴

Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara. Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan peerintahan negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya (*reseduary powers*).³⁵

³⁴ *Ibid*, h. 34

³⁵ C. S. T, Kansil, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004). h. 135.

Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: *monarki*, *oligarki*, dan *demokrasi*.

1. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: *monarki absolut* dan *monarki konstitusional*. Diantaranya sebagai berikut:³⁶

a. Monarki Absolut

Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, Brunai Darussalam, Swazilan, Bhutan.

b. Monarki Konstitusional

Adapun, monarki konsitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas symbol negara.

2. Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.³⁷

3. Demokrasi

³⁶ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, h. 127

³⁷ *Ibid*, h. 127

Demokrasi Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, adil, dan adil. Dalam teori Ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik. Untuk menentukan suatu Negara itu berbentuk monarchie dan republik, dalam Ilmu Negara banyak macam ukuran yang dipakai. Antara lain Jellinek dalam bukunya yang berjudul *Allgemene Staatslehre* memakai sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang saja, maka bentuk Negara itu monarchie dan jika kehendak Negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah republik.³⁸

Pendapat Jellinek ini tidak banyak penganutnya karena banyak mengandung kelemahan. Fahaman Duguit lebih lazim dipakai, yang menggunakan sebagai kriteria bagaimana caranya kepala Negara itu diangkat. Dalam bukunya yang berjudul *Traite de Droit Constitutionnel* jilid 2, diutarakan jika seseorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya disebut monarchie dan Kepala Negeranya disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan

³⁸ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, h. 20

umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan Kepala Negaranya adalah seorang Presiden.³⁹

D. Konsep Negara Bangsa

Nation-State (negara-bangsa) ialah negara yang didirikan pada kebangkitan semangat kebangsaan untuk membangun sebuah negara yang berdaulat dan bebas dari ancaman pengaruh yang dapat menggugat dan menghancurkan gagasan serta wawasan negara-bangsa.⁴⁰ Gabungan semangat kebangsaan (*nation hood*) dan gagasan negara (*state*) inilah yang kemudian dikenal dengan negara-bangsa.⁴¹ Kebanyakan negara-bangsa yang terbentuk setelah merdeka terkena berbagai bentuk Ekstremisme yang menggugat keamanan negara, ketertiban awan dan stabilitas politik. Negara-bangsa adalah laksana batu pejal yang besar yang merintang jalan kita akibat kejahatan sejarah berlaku pada masa lampau.⁴²

Satu tantangan yang menjadi utama *nation-state* (negara-bangsa) adalah mempertahankan keamanan dan membendung berbagai anasir serta pengaruh ekstremis yang menyebabkan ancaman dan menimbulkan banyak masalah kepada “*survival*” *nation-state* (negara-bangsa). Ektremisme bermaksud pelampau atau golongan radikal yang menakutkan, mengkhawatirkan dan dapat mendatangkan dampak buruk kepada orang lain, masyarakat dan

³⁹ *Ibid.* h. 20

⁴⁰ Abd.Rahim Abd.Rashid, *Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa* (Malaysia: Maziza SDN.BHD, 2004), h. 19

⁴¹ Syamsir Salam, Jaenal Aripin, dkk, *Menuju Islam Berkadaban* (Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta Press, 2007), h. 124.

⁴² Kalim Siddiqui, *Negara Penghalang Pembentukan Ummah* (Kuala Lumpur: Pustaka Alami, 1985), h. 5.

negara.⁴³

Secara etimologis, “negara” berasal dari bahasa asing “*Staat*” (Belanda, Jerman), atau “*State*” (Inggris) dan “*Etat*” (Perancis). Kata “*Staat*” atau “*State*” pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status itu dalam bahasa Latin klasik sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.⁴⁴

Jadi dari pengertian di atas, negara adalah satu kesatuan organisasi yang di dalamnya ada sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang *permanent* (tetap) dan memiliki kekuasaan yang mana di atur oleh pemerintahan yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara segala instrumen-instrumen yang ada di dalamnya dengan kekuasaan yang ada.

Dari segi bahasa kata *nation* yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang terdiri sendiri dan masing-masing merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa secara eksklusif milik suatu masa tertentu yang secara historis masih

⁴³ Abd.Rahim Abd.Rashid, *Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa*, h.19.

⁴⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1980), h. 92.

baru. Bangsa hanya merupakan suatu kesatuan sosial sejauh ini berkaitan dengan negara teritorial modern tertentu yang berkaitan dengan negara-bangsa.

45

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (*political legitimacy*). Para nasionalis, suatu bangsa tidak bisa melangsungkan hidupnya kalau tidak terdapat ketiga sasaran ini dalam derajat yang memadai adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu “bangsa” yang aktual atau “bangsa” yang potensial. Inilah definisi kerja yang didasarkan pada unsur umum dari ideal nasionalis yang mempunyai gaya sendiri, sehingga berkarakter induktif. Sesungguhnya, setiap *nation-state* (negara-bangsa) mengejar sasaran identitas nasional ini dalam tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi, selalu akan kembali kepada ideal bangsa itu sendiri. Suatu ideologi yang hanya memperjuangkan “bangsa” semata-mata, dan berupaya mempertinggi serajat dan keberadaan bangsa itu sebagai simbol perjuangan bangsa.⁴⁶

Pengertian utama dari “bangsa”, dan yang paling sering dikemukakan dalam literature, adalah pengertian politis. Pengertian ini menyamakan “rakyat” dan negara menurut Revolusi Amerika dan Perancis, suatu penyamaan yang biasa dijumpai dalam ungkapan-ungkapan seperti “negara-bangsa” (*nation-state*), Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*), atau retorika

⁴⁵ *Ibid*, h. 101.

⁴⁶ Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), h. 171.

para Presiden akhir abad ke-20. Bangsa seperti yang digambarkan adalah kelompok para warganegara yang berdaulat kolektifnya membentuk suatu negara yang merupakan ekspresi politik mereka.⁴⁷

Sebuah *nation-state* (negara-bangsa) adalah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entitas berdaulat bagi suatu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat, yang pada prinsipnya adalah tipe masyarakat yang sama, terorganisir oleh latar belakang suku atau budaya yang sama di suatu wilayah. Di sebuah *nation-state* (negara-bangsa), biasanya setiap orang akan berbicara dengan bahasa yang sama, menganut agama atau aliran agama yang sama, dan memiliki nilai budaya nasional. Contohnya adalah negara Jepang, karena nasionalisme dan bahasa yang seragam.⁴⁸

Adapun *nation-state* (negara-bangsa) sendiri baru lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Negara-bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme yang pertama muncul di Eropa adalah nasionalisme romantis (*romantic nationalism*) demi kehidupan tani yang murni, sederhana dan tidak korup yang kemudian dipercepat oleh munculnya Revolusi Perancis dan penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte. Beberapa gerakan nasionalisme pada waktu ini bersifat separatis, karena kesadaran nasionalisme mendorong gerakan untuk melepaskan diri dari kekaisaran atau kerajaan tertentu. Misalnya, setelah kejatuhan Napoleon Bonaparte, Kongres Wina

⁴⁷ E.J. Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, h. 21.

⁴⁸ Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKPAI, 2005), h. 133.

pada tahun 1814 memutuskan bahwa Belgia yang sebelumnya dikuasai Perancis menjadi milik Belanda, dan lima belas tahun kemudian menjadi negara nasional yang merdeka.

Begitu pula revolusi Yunani tahun 1821-1829 dimana Yunani ingin melepaskan diri dari dibelenggu kekuasaan Kekaisaran Ottoman dari Turki. Sementara di belahan Eropa lain, nasionalisme muncul sebagai kesadaran untuk menyatukan wilayah atau daerah yang terpecah-belah. Misalnya, Italia di bawah pimpinan Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, dan Giuseppe Garibaldi, yang mempersatukan dan membentuk Italia menjadi sebuah negara-kebangsaan tahun 1848. Di Jerman sendiri, kelompok-kelompok negara kecil akhirnya membentuk sebuah negara kesatuan Jerman dengan nama Prusia pada tahun 1871 di bawah Otto von Bismarck. Banyak negara kecil di bawah kekuasaan kekaisaran Austria pun membentuk negara-bangsa sejak awal abad 19 sampai masa setelah Perang Dunia I. Sementara itu, Revolusi 1917 di Rusia juga telah melahirkan negara-bangsa Rusia.⁴⁹

Kesadaran berbangsa dalam pengertian *nation-state* (negara-bangsa) dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Perjanjian Baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin. Implikasi

⁴⁹ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 4.

yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johan Gothenberg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan.⁵⁰

Pada perang dunia II (1939-1945) antara negara-negara Eropa yang melibatkan kesultanan Turki Utsmani di dalamnya, begitu besar dalam memengaruhi terjadi perubahan terutama bagi pembentukan berbagai *nation-state* (negara-bangsa) di dunia Islam. Benih-benih kesadaran seperti itu bagi umat Islam yang saat itu hampir mayoritas sedang berada di bawah cengkeraman imperialis Barat. Justru itu, memberi kesempatan pada makna “nasionalisme” sebagai sebuah satu loncatan bukan hanya sekadar ideologi politik untuk menuju kemerdekaannya, tetapi lama-kelamaan dijadikan sebagai metode simbolisasi bagi upaya-upaya mengurus rumah tangga kebangsaannya sendiri.⁵¹ Selain itu, populasi *nation-state* (negara-bangsa) teritorial besar hampir senantiasa terlalu heterogen untuk mengaku memiliki kesukaan etnik bahkan bila kita menyampingkan imigrasi medoren, dan bagaimanapun juga sejarah demografik dari negara-negara besar Eropa adalah kelompok-kelompok etnis, khususnya ketika daerah dikosongkan dan diisi lagi dari waktu ke waktu,

⁵⁰ Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme* (Bandung: Nuansa, 2001), h. 24-25

⁵¹ Ajib Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etro-Linguistik dan Geo-Politik*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2009), h. 97.

seperti di daerah yang luas di Eropa tengah, timur dan tenggara, bahkan di bagian-bagian negara Perancis.⁵²

Pada periode yang sama menjadi saksi klimaks nasionalisme Eropa, yang memuncak pada Nazisme dan pembunuhan massal yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, pada sisi lain disusul dengan nasionalisme di Asia dan Afrika yang mengambil bentuk gerakan kemerdekaan yang antikolonial. Ketika itu, secara luas muncul anggapan bahwa kekuatannya telah habis, nasionalisme justru kembali bersemi dengan gerakan otonomi etnis di Barat pada tahun 1960-an dan 1970-an di Catalon dan Euzkadi, Corsica dan Brittany, Flanders, Skotlandia dan Wales, serta Quebec redup kembali pada tahun 1980-an, lalu bangkit ketika perestroika dan glasnost mendorong nasionalisme di negara-negara republik bagian Uni Soviet pada tahun 1988, yang kemudian berperan dalam merontokan Uni Soviet 1991. Dalam atmosfer pengharapan yang besar ini, kita menyaksikan tragedi- tragedi nasionalisme etnis baru berlangsung pada dekade terakhir abad kedua puluh di anak benua India, Timur-Tengah dan Horn Afrika, di Rwanda, di Caucasus, lebih- lebih lagi dalam perang Yugoslavia beserta kelanjutan yang serba tidak menentu.⁵³

Kesimpulan yang ada dalam sejarah ini, dapat dilihat bahwa munculnya latar belakang *nation-state* (negara-bangsa) ini adalah, pertama menuntut kemerdekaan kedua kolonial Barat, ketiga penyebaran pemikiran, dan keempat kepentingan dalam membentuk pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

⁵² E.J. Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, h. 70.

⁵³ Anthony D.smith, *Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), h. 109.

Beberapa kajian tentang al-Farabi yang membahas politik atau kenegaraan antara lain:

Pertama, buku karangan al-Farabi sendiri dengan judul *al-Madinah al-Fadilah*, menuliskan ciri negara utama yang menurutnya sebagai konsep ideal untuk dijadikan contoh membangun negara. Di dalam ciri-ciri negara utama itu, al-Farabi menuliskan beberapa konsep kepemimpinan. Hal ini dikarenakan dalam membangun suatu negara utama, tentu harus diimbangi dengan kepemimpinan yang utama pula, negara diibaratkan sebagai tubuh, kemudian pemimpin menjadi pusat dari keinginan tubuh itu.

Kedua, *Negara Utama* yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1968. Di dalam buku ini, menggambarkan bahwa pembentukan suatu negara harus memiliki konsep pemikiran dalam menciptakan suatu negara yang ideal. Dalam penelitian ini juga tidak terlepas dari keilmuan para muslim seperti al-Farabi yang dapat memberikan penjelasan bagaimana suatu negara tersebut dianggap baik dan dianggap kurang baik bagi masyarakat yang merasakannya. Di dalam kitab *Ara' ahl al-Madinah al-Fadilah* karya al-Farabi, ia menjelaskan bagaimana negara yang baik dan ideal itu seperti bagian tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang baik memiliki masyarakat yang baik, pemimpin yang baik serta ideologi yang baik guna terciptanya suatu negara yang ideal yang diidam-idamkannya, demi kepentingan masyarakat Islam.

Ketiga, skripsi tentang *Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama al-Farabi yang ditulis oleh Muhammad Fanshobi*, seorang mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, jurusan Aqidah-Filsafat. Skripsi ini membahas kriteria kepemimpinan dan konsep negara utama al-Farabi yang dikaitkan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Keempat, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabidan Khomeini* yang ditulis oleh Yamani. Buku ini menjelaskan tentang perbandingan pemikiran filsafat politik al-Farabi dan Khomeini yang memiliki tujuan untuk mencari tahu adanya konsep wilayah al-Faqih pemikiran Ayatullah Khomeini dalam pemikiran al-Farabi. Di dalam buku ini, mereka membahas tentang seorang pemimpin yang dianggap ma'sum yang berkedudukan sebagai kepala negara serta kepala agama.

Kelima, *Konsep Negara Ideal Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi*, yang di tulis oleh Mahmuda Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pembentukan suatu negara harus memiliki konsep pemikiran dalam menciptakan suatu negara yang ideal. Dalam penelitian ini juga tidak terlepas dari keilmuan para muslim seperti al-Farabi yang dapat memberikan penjelasan bagaimana suatu negara tersebut dianggap baik dan dianggap kurang baik bagi masyarakat yang merasakannya.

Persaman, bagaimana negara yang baik dan ideal itu seperti bagian tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang baik memiliki masyarakat yang baik, pemimpin yang baik serta ideologi yang baik guna terciptanya suatu negara yang ideal yang diidam-idamkannya, demi kepentingan masyarakat Islam.

Perbedaan, pembentukan suatu negara harus memiliki konsep pemikiran dalam menciptakan suatu negara yang ideal.

Dalam sekripsi ini penulis mengkaji tentang Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi bahwa negara yang didirikan oleh warga negara yang sadar yang mempunyai tujuan dan tegas untuk mencapai kebahagiaan. Masing-masing warga sadar akan tujuan dari negara tersebut, mereka sanggup mendukung cita-cita negara dan menjadikannya suatu tujuan bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam pembangunan negara-bangsa Indonesia untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Abu Daud Busroh, S.H, *Ilmu Negara* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Abd.Rahim Abd.Rashid, *Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa Malaysia*: Maziza SDN.BHD, 2004.
- Abdul Sidiq, *Islam dan Filsafat* Jakarta: Triputra, 2004.
- Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ" Ahl al-Madînah al-Fâdlilah* Beirut: Daar al-Masyriq, 2000.
- Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Ajib Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etro-Linguistik dan Geo-Politik*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2009.
- Anthony D.smith, *Nasionalisme Teori, Ideologi, Sejarah* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme* Bandung: Nuansa, 2001.
- C. S. T, Kansil, *Ilmu Negara* Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara* Surabaya: Srikandi, 2005.
- E.J. Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* Bandung: Binacipta, 1980.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* Jakarta, Gramedia, 1994.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta : Gramedia. 2003.

Hayimsyah Nasution, *Filsafat Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama 2002.

Idrus Ruslan, “Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama” *Al-Adyan*, Vol. VIII, N0. 2, (Juli-Desember, 2013).

Inu Kencana Syai’ie, *Ilmu Pemerintahan* Bandung: Mandar Maju, 2002.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Moh. Radjah, Bhuratata, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Jawahir Thontowi Dan Pranoto Iskandar *Ilmu Negara* Bandung: Bulan Bintang 2004.

Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara* Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.

Kahrawi Ridwan, *Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 2003.

Kalim Siddiqui, *Negara Penghalang Pembentukan Ummah* Kuala Lumpur: Pustaka Alami, 1985.

Komarrudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* Jakarta: Paramadina, 1998.

M.M. Sharif, *Para Filosof Muslim* Bandung: Mizan, 1994.

Mahfud M. D, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2001.

Mahfud M. D, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* Yogyakarta: Gema Media, 1999.

- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal* Yogyakarta: IRCISOD, 2018.
- Moh. Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)* Malang: Uin Malang Press, 2009.
- Muhammad Yahya, *Ensiklopedia Islam* P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: UI Press. 1993.
- Mustofa Hasan, *Sejarah Filsafat Islam, genealogis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan* Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Noer, *Pemikiran Politik* Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965.
- Osman Bakar, *Hierarki; Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu menurut al-Farabi, al-Ghazali, dan Qutb al-Din al-Siraji* Bandung: Mizan, 2001.
- Poerwantana, *Seluk Beluk Filsafat Islam* Bandung: P.T. RemajaRosdakarya, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah* Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Samidjo, *Ilmu Negara* Jakarta: Pustaka, 2003.

Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporation Governance* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam (Filosof dan Filsafatnya)* PT. Raja Grafindo Persada

Syamsir Salam, Jaenal Aripin, dkk, *Menuju Islam Berkadaban* Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta Press, 2007.

Yamani, *Al-Farabi Filosof Politik Muslim* Jakarta: Teraju, 2005.

Yamani, *Filsafat Politik Islam: antara al-Farabi dan Khomeini* Bandung: Mizan, 2002.

Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama* Jakarta: P.T. Kinta 1968.

Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKPAI, 2005.